

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kemiskinan perdesaan bukan merupakan suatu gejala yang baru. Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang relatif besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,28 juta orang (11,25%) pada bulan Maret 2014. Angka tersebut meningkat pada bulan Maret 2015 yakni menjadi 28,59 juta orang (11,22%) (BPS, 2015).

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2014-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), dan ketiadaan jaminan masa depan. Permasalahan inilah yang dialami

sebagian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sumiyati, 2013).

Fenomena yang menarik pada rumah tangga (masyarakat) miskin dalam mempertahankan hidup dengan tingkat kehidupan yang layak, yaitu *pertama* pada sisi pengeluaran melakukan penghematan pada pengeluaran yang dirasakan dapat ditunda, pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi sedapat mungkin dihindari atau dikurangi. *Kedua*, pada sisi pendapatan rumah tangga pada rumah tangga miskin telah memaksa mereka untuk melakukan pengoptimalan pendapatan melalui pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk tetap dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan atau kehidupan yang layak. Namun demikian upaya ini tidak semuanya mampu untuk dapat mempertahankan pada tingkat kehidupan yang layak (Sugeng, 2008).

Kegagalan pembangunan berbasis pertumbuhan dan sentralistik memunculkan gagasan-gagasan baru dalam upaya yang lebih partisipatif menghargai lokalitas dan berasaskan pemerataan yaitu pemberdayaan masyarakat, pandangan ini sebenarnya menunjuk pada hakekat pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat miskin menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Prihantoro, 2013).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat

miskin. Sementara itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat adalah dengan membentuk sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu kelompok sasaran dari kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah selama ini adalah kaum perempuan terutama ibu rumah tangga keluarga miskin atau kurang mampu. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan perempuan ibu rumah tangga keluarga miskin atau kurang mampu agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat menambah penghasilan keluarga. Dengan program pemberdayaan tersebut diharapkan kaum perempuan/ibu rumah tangga keluarga kurang mampu dapat melakukan kegiatan usaha produktif untuk menambah penghasilan keluarga, dan dapat ikut serta berperan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian memberdayakan perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan (Indriyati, 2015).

Di sisi lain juga merupakan dorongan dari perubahan dalam paradigma pembangunan internasional yang telah menuntut adanya pelibatan perempuan dalam pembangunan, dan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan perempuan di dalam strategi pembangunan. Ada beberapa pendekatan yang sebetulnya telah dilaksanakan di mana pada awalnya tekanannya adalah pada

*Woman in Development (WID)*. Di mana pendekatan pertama kali adalah pendekatan kesejahteraan: bagaimana kesejahteraan itu ditingkatkan, wanita dianggap sebagai objek pembangunan. Kemudian pendekatan kesamaan. Kemudian ada pendekatan anti-kemiskinan, efisiensi, dan sebagainya, yang semuanya ini dianggap tidak mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri. Sampai pada akhirnya muncul pendekatan mutakhir yang disebut dengan pendekatan pemberdayaan (Saptandari, 1999).

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Fenomena di atas menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat (Dreze and Sen, 1999).

Berkaitan dengan pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tanggamiskin, menuntut wanita sebagai istri untuk dapat menopang ketahanan ekonomikeluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Dalam beberapa tahun terakhir ini keterlibatan wanita pada sektor publik menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini

menunjukkan bahwa motivasi wanita untuk bekerja di sektor publik semakin tinggi (Sugeng, 2008).

Wanita pada rumah tangga miskin, rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah karena kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya. Wanita ini masuk ke pasar kerja dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan rendah. Wanita dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah inilah yang justru banyak masuk ke lapangan kerja, terutama pada sektor informal dengan motivasi menambah pendapatan keluarga.

Menurut Rose (1992) dalam Asmorowati (2007) karakteristik perempuan dibandingkan pria adalah mereka lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita. Hal itu karena perempuan memiliki cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Disamping kemampuan untuk mengolah sedemikian pendapatan mereka, perempuan lebih mungkin untuk menggunakan pinjamannya bersama dengan suami dan anggota keluarga mereka. Selain itu, perempuan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hampir keseluruhan pendapatan tersebut dan lebih memperhatikan masa depan anak-anak mereka dan siap untuk berkorban apa saja untuk mewujudkan masa depan tersebut (Kabeer, 2001; Khandker, 1998 dalam Asmorowati 2007).

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MP pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : (1) penyediaan dan perbaikan pasarana atau sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya, (2) penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, perhatian yang lebih besar

diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini, (3) kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia” (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, khususnya perempuan rumah tangga miskin, pemerintah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dimana salah satu kegiatannya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Nagari IV Koto Palembayan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam merupakan salah satu kecamatan yang mendapat kucuran dana PNPM Mandiri Perdesaan

Pada tahun 2008-2015, jumlah kecamatan yang mengikuti program ini adalah 16 kecamatan. Di Kecamatan Palembayan, kegiatan PNPM-MP secara keseluruhan berjalan dengan lancar, jadi peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Palembayan khususnya Nagari IV Koto Palembayan, karena kecamatan ini merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Agam dan pusat dari semua kegiatan seluruh nagari.

Kegiatan perekonomian yang terdapat di Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan masih didominasi oleh sektor usaha mikro dan kecil yang meliputi pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni, terkendala oleh modal. Padahal modal dianggap unsur yang paling penting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat perdesaan, keterbatasan modal menjadi penyebab kreatifitas dalam pengembangan usaha menjadi terhambat.

Dari data peminjam kredit di PNPM-MP Nagari IV Koto Palembayan dalam kegiatan PNPM-MP ini berjumlah sebanyak 50 kelompok Simpan Pinjam

Perempuan. Semua kelompok SPP yang berjumlah 50 kelompok telah melakukan pengembalian pinjaman pokok beserta bunga sebanyak 12 kali angsuran. Dengan pengembalian sebanyak 12 kali ini maka tidak terdapat tunggakan SPP di Nagari IV Koto Palembayan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang: **“Kontribusi PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan(Studi Kasus Pnpm Mandiri Pedesaan Wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kontribusi PNPM Mandiri Pedesaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan wilayah nagari IV koto Palembayan tengah.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang pengaruh PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan wilayah nagari IV koto Palembayan tengah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka pemikiran penulis.

2. Bagi Akademis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang Pengaruh Kinerja Keuangan UMK terhadap Pemberdayaan Perempuan.
3. Bagi PNPM, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam penyaluran kredit lembaga keuangannya.
4. Bagi nasabah perempuan yang menjalaninya, sebagai motivasi bahwa perempuan mempunyai potensi yang besar dalam menjalankan usaha dengan baik.
5. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

#### **1.5. Batasan Masalah**

Adanya lembaga keuangan mikro sebagai salah satu institusi penyaluran kredit sangat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memberi bantuan dana bergulir yang akan digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam penelitian ini hanya akan memilih nasabah perempuan sebagai responden dan penelitian ini dilakukan di PNPM Mandiri Palembang Tengah. Selain itu, skala usaha yang dilakukan hanya Usaha Mikro dan Kecil serta sedikitnya literature yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dan sebagian besar dari yang sedikit itu menyebutkan pemberdayaan perempuan sebagai suatu gender atau penyamarataan peranan hampir di segala aspek, maka penelitian ini hanya akan fokus pada proses pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan aspek internal keluarga.



## 1.6. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penulisannya dibagi ke dalam enam bab dengan sistematika adalah sebagai berikut:

### Bab I           Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II           Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB III        Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan mengenai pembahasan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### BAB IV        Gambaran Perusahaan

Bab ini merupakan tentang gambaran umum perusahaan.

### Bab V           Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan tentang karakteristik responden, deskripsi jawaban responden, hasil analisis data serta pembahasan.

### Bab VI         Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.